

I.1. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN PELAKSANAAN PROSEDUR
PERSETUJUAN BERSAMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permintaan Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala KPP (4)
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7)
Alamat : (8)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/wakil/kuasa dari Wajib Pajak*)
Nama : (9)
NPWP : (10)
Alamat : (11)

dengan ini mengajukan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama
dengan penjelasan sebagai berikut:

Materi yang diajukan Prosedur : (12)
Persetujuan Bersama
Jenis Pajak : (13)
Tahun/Masa Pajak : (14)
Mitra Persetujuan : (15)
Penghindaran Pajak Berganda

Dasar permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama:

1. (16)
2. (16)

Penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
menurut Wajib Pajak:

1. (17)
2. (17)

Nilai pajak terutang menurut Wajib Pajak**):

1. (18)
2. (18)

Identitas wajib pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur
Persetujuan Bersama***):

Nama Wajib Pajak : (19)
Nomor Identitas Pajak : (20)
Alamat : (21)

Daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh
Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas
Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai
ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda: (22)

No	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/wakil/kuasa*)

..... (23)

Keterangan:

- *) Coret yang tidak perlu.
- **) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan:
 - a. pengenaan pajak oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda; atau
 - b. pengenaan pajak termasuk pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- ***) Diisi dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama terkait dengan transaksi yang melibatkan Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN
PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA
OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak dari Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama dan dalam hal permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama diajukan oleh Wajib Pajak orang pribadi maka nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama adalah wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan materi yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (13) : Diisi dengan jenis pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (14) : Diisi dengan tahun pajak atau masa pajak yang diajukan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan dasar diujukannya permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama oleh Wajib Pajak.

- Nomor (17) : Diisi dengan penerapan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang seharusnya menurut Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan nomor identitas pajak Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (21) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak dalam negeri Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang terkait dengan permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan daftar informasi dan/atau bukti atau keterangan yang dimiliki oleh Pemohon yang menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tidak sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa.